

ENTITAS PELAPORAN

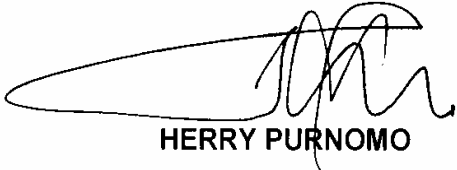
No.	Kode BA	Uraian Bagian Anggaran
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	005	Mahkamah Agung
5.	006	Kejaksaan Agung
6.	007	Sekretariat Negara
7.	010	Departemen Dalam Negeri
8.	011	Departemen Luar Negeri
9.	012	Departemen Pertahanan
10.	013	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	015	Departemen Keuangan
12.	018	Departemen Pertanian
13.	019	Departemen Perindustrian
14.	020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	022	Departemen Perhubungan
16.	023	Departemen Pendidikan Nasional
17.	024	Departemen Kesehatan
18.	025	Departemen Agama
19.	026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20.	027	Departemen Sosial
21.	029	Departemen Kehutanan
22.	032	Departemen Kelautan dan Perikanan
23.	033	Departemen Pekerjaan Umum
24.	034	Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
25.	035	Menko Bidang Perekonomian
26.	036	Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
27.	040	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
28.	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
29.	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi
30.	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
31.	044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
32.	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
33.	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
34.	050	Badan Intelijen Negara
35.	051	Lembaga Sandi Negara
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional
37.	054	Badan Pusat Statistik
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
39.	056	Badan Pertanahan Nasional
40.	057	Perpustakaan Nasional

No.	Kode BA	Uraian Bagian Anggaran
41.	059	Departemen Komunikasi dan Informatika
42.	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia
43.	061*	Cicilan Bunga Utang
44.	062*	Subsidi dan Transfer
45.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
46.	064	Lembaga Ketahanan Nasional
47.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal
48.	066	Badan Narkotika Nasional
49.	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
50.	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
51.	069*	Belanja Lain-Lain
52.	070*	Dana Perimbangan
53.	071*	Dana Otonomi Khusus dan penyeimbang
54.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
55.	075	Badan Meteorologi dan Geofisika
56.	076	Komisi Pemilihan Umum
57.	077	Mahkamah Konstitusi
58.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
59.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
60.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional
61.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
62.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
63.	083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
64.	084	Badan Standardisasi Nasional
65.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66.	086	Lembaga Administrasi Negara
67.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia
68.	088	Badan Kepegawaian Negara
69.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
70.	090	Departemen Perdagangan
71.	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat
72.	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
73.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi
74.	094	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
75.	095	Dewan Perwakilan Daerah
76.	096*	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri
77.	097*	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri
78.	098*	Penerusan Pinjaman
79.	099*	Penyertaan Modal Negara
80.	100	Komisi Yudisial
81.	101*	Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah
82.	102*	Penerusan Hibah
83.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
84.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
85.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

* Tata Cara Pelaporan Keuangan atas Bagian Anggaran ini tidak diatur dalam Perdirjen ini

Unit organisasi lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran, tetapi mengelola dana APBN/menggunakan dan atau memanfaatkan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah entitas pelaporan, antara lain :

- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang
- Badan Pengelola Gelora Bung Karno
- Badan Pengelola Kompleks Kemayoran
- Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas
- Lembaga Penyiaran Publik RRI
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- Unit Organisasi lainnya

HP **DIREKTUR JENDERAL**

HERRY PURNOMO
NIP 060046544